

## **ABSTRAK**

### **IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
NANDA RENDHYKA**

Permasalahan utama yang terjadi di kota ini adalah masalah permukiman manusia, yang pada umumnya disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat meningkatkan permintaan akan ruang perumahan. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Perkembangan Kawasan ini kian pesat karena peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah yang dapat memicu berbagai masalah diantaranya penumpukan jumlah penduduk pada satu kawasan tertentu dan dapat berpotensi menimbulkan daerah permukiman kumuh baru.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia, dengan menggunakan 7 indikator pengukuran tingkat kekumuhan yaitu kerapatan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, drainase, proteksi kebakaran yang diklasifikasi dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) sebagai penentu harkat pembobotan.

Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini tingkat kekumuhan tinggi sebesar 0,880% dengan luas 3,683 ha, tingkat kekumuhan sedang sebesar 2,932% dengan luas 12,262 ha dan tingkat kekumuhan ringan sebesar 96,184% dengan luas 402,13 ha. Berdasarkan penelitian ini Kawasan kumuh ringan lebih mendominasi tersebar di kecamatan Rajabasa.

Kata kunci: Skoring, Kawasan Kumuh, Kecamatan Rajabasa,Klasifikasi.

## **ABSTRACT**

# **IDENTIFIKASI KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**

**By**

**NANDA RENDHYKA**

The main problem that occurs in this city is the problem of human settlements, which is generally caused by the increasing population. Population growth can increase the demand for residential space. One of the affected areas is Rajabasa District, Bandar Lampung City. The development of this area is increasingly rapid due to the increase in the number of residents every year which can trigger various problems including the accumulation of population in one particular area and can potentially lead to new slum areas.

The City Without Slums Program (KOTAKU) is one of a number of strategic efforts by the Directorate General of Human Settlements of the Ministry of Public Works and Public Housing to accelerate the handling of slums in Indonesia, using 7 indicators for measuring the level of slums, namely building density, environmental roads, drinking water supply, management of slums, waste water, waste management, drainage, fire protection classified using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method as a determinant of the weighting value.

The results obtained in this study were the high slum level of 0.880% with an area of 3.683 ha, a moderate slum level of 2.932% with an area of 12,262 ha and a light slum level of 96.184% with an area of 402.13 ha. Based on this research, light slum areas are more dominant in Rajabasa sub-district.

**Keywords:** Skoring, Slums, Rajabasa District, Classification.